

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam sistem demokrasi, legitimasi kekuasaan tidak hanya diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum, tetapi juga dibangun melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai proses politik dan pemerintahan. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam menentukan arah pembangunan serta mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umum secara berkala, tetapi juga dari tingkat partisipasi politik masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan publik. Semakin tinggi kualitas partisipasi masyarakat, semakin kuat pula kualitas demokrasi yang terbangun karena kebijakan publik lahir melalui proses yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel (Prayugo, 2023).

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan demokrasi. Partisipasi politik tidak hanya dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat dalam memberikan suara pada saat pemilihan umum, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan warga negara untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan politik (Kusnia et al., 2024). Aktivitas tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam musyawarah, penyampaian aspirasi, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan, maupun partisipasi dalam proses pembangunan. Dengan demikian, partisipasi politik mencerminkan hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Semakin besar keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktivitas politik, semakin tinggi pula peluang terciptanya kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Sarbaini, 2020).

Partisipasi politik menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi karena mencerminkan tingkat kesadaran politik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta kepedulian warga negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Tingginya partisipasi politik menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta bersedia terlibat dalam berbagai proses politik. Sebaliknya, rendahnya partisipasi politik dapat mengindikasikan adanya berbagai persoalan, seperti rendahnya tingkat pendidikan politik, terbatasnya akses informasi, menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah, hingga kondisi sosial dan ekonomi yang membatasi keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik. Oleh sebab itu, partisipasi politik tidak hanya dipahami sebagai tingkat kehadiran masyarakat dalam pemilihan umum, tetapi juga sebagai cerminan kualitas hubungan antara negara dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh (Ahaya et al, 2025).

Untuk memahami bagaimana masyarakat memandang dan merespons sistem politik, diperlukan suatu kerangka yang mampu menjelaskan orientasi politik warga negara. Salah satu teori yang relevan adalah teori budaya politik yang dikemukakan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba. Menurut Almond dan Verba, budaya politik merupakan pola orientasi masyarakat terhadap sistem politik yang memengaruhi cara individu berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan politik. Orientasi tersebut terdiri atas tiga dimensi, yaitu orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluatif. Orientasi kognitif berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai sistem politik. Orientasi afektif berkaitan dengan perasaan, kepedulian, serta keterikatan emosional masyarakat terhadap sistem politik dan penyelenggara pemerintahan. Sementara itu, orientasi evaluatif berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kebijakan maupun kinerja pemerintah berdasarkan nilai, pengalaman, dan informasi yang dimiliki. Ketiga orientasi tersebut menjadi dasar untuk melihat bagaimana budaya politik masyarakat terbentuk serta bagaimana orientasi tersebut memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik (Budaya Politik, 2013:22 dalam Arfasa et al., 2022).

Selain dipengaruhi oleh orientasi politik masyarakat, partisipasi politik juga dapat dipahami melalui bentuk keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Cohen dan Uphoff menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya diukur dari kehadiran dalam suatu kegiatan, tetapi juga dari keterlibatan aktif masyarakat pada setiap tahapan pembangunan. Bentuk partisipasi tersebut meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil dan partisipasi dalam evaluasi (Basrowi, 2012:66 dalam Suparto, 2021). Melalui pendekatan ini, partisipasi masyarakat dipahami sebagai suatu proses yang berlangsung secara berkelanjutan, mulai dari penyampaian aspirasi hingga pengawasan terhadap hasil pembangunan. Oleh karena itu, teori Cohen dan Uphoff memberikan gambaran mengenai sejauh mana masyarakat berperan sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan.

Penelitian mengenai partisipasi politik masyarakat tidak cukup hanya dipahami dari satu sudut pandang. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori Almond dan Verba serta teori Cohen dan Uphoff secara saling melengkapi. Teori Almond dan Verba digunakan untuk menganalisis orientasi politik masyarakat melalui dimensi kognitif, afektif, dan evaluatif, sehingga dapat diketahui bagaimana tingkat pengetahuan, kepedulian, serta penilaian masyarakat terhadap kehidupan politik di desa. Sementara itu, teori Cohen dan Uphoff digunakan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Penggunaan kedua teori tersebut memungkinkan penelitian memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai partisipasi politik masyarakat, baik dari aspek orientasi politik maupun dari aspek keterlibatan nyata masyarakat dalam proses pembangunan desa. Dengan demikian, partisipasi politik masyarakat tidak hanya dipahami dari apa yang dipikirkan dan dirasakan masyarakat, tetapi juga dari bagaimana partisipasi tersebut diwujudkan dalam praktik kehidupan politik di tingkat desa.

Secara empiris, tingkat partisipasi politik masyarakat di Indonesia masih menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU)

menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2015 mencapai sekitar 69%, kemudian meningkat menjadi sekitar 76% pada Pilkada tahun 2020. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam keterlibatan masyarakat pada proses demokrasi elektoral. Namun, kondisi tersebut tidak berlanjut pada Pilkada Serentak tahun 2024. KPU mencatat bahwa tingkat partisipasi pemilih kembali mengalami penurunan hingga berada di kisaran 69% dan belum mencapai target partisipasi nasional yang telah ditetapkan. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia serta memerlukan perhatian yang lebih mendalam, khususnya pada tingkat lokal (Togala et al., 2025).



Gambar 1. *Tingkat Partisipasi Pemilih nasional Pilkada di Indonesia*

Meskipun tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sering dijadikan indikator keberhasilan demokrasi, partisipasi politik masyarakat pada hakikatnya tidak hanya terbatas pada aktivitas elektoral. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, partisipasi politik juga tercermin melalui keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi pembangunan. Bentuk partisipasi tersebut menunjukkan adanya interaksi yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Oleh karena itu, untuk memperoleh

gambaran yang lebih utuh mengenai kualitas demokrasi, partisipasi politik perlu dipahami tidak hanya melalui keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum, tetapi juga melalui keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat desa (Kartini & Mesra, 2025).

Desa merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga menjadi ruang yang strategis dalam mewujudkan demokrasi partisipatif. Berbagai kebijakan telah memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, antara lain melalui Musyawarah Desa (*Musdes*), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (*Musrenbang Desa*), pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa, serta penyampaian aspirasi mengenai kebutuhan pembangunan (Saragih, 2017). Melalui berbagai mekanisme tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga berperan sebagai aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pemanfaatan hasil pembangunan, hingga evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, kualitas pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi politik masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan (Ginting, 2024).

Meskipun ruang partisipasi telah disediakan melalui berbagai mekanisme tersebut, pelaksanaan partisipasi politik masyarakat di tingkat desa belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat pendidikan politik, keterbatasan akses informasi, dominasi elit lokal dalam proses pengambilan keputusan, rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang membatasi keterlibatan mereka dalam kegiatan pemerintahan desa. Akibatnya, partisipasi masyarakat sering kali hanya bersifat administratif atau formalitas, misalnya hadir dalam forum musyawarah tanpa terlibat secara aktif dalam penyampaian pendapat maupun proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tersedianya ruang partisipasi belum tentu diikuti oleh kualitas partisipasi yang tinggi (Murdianto & Alamsyah, 2025).

Dalam konteks pembangunan nasional, tidak seluruh desa memiliki tingkat

perkembangan yang sama. Sebagian desa masih menghadapi berbagai keterbatasan yang menyebabkan proses pembangunan berjalan lebih lambat dibandingkan desa lainnya. Desa tertinggal merupakan desa yang memiliki keterbatasan dalam berbagai aspek pembangunan, seperti kualitas sumber daya manusia, kondisi sosial ekonomi, infrastruktur, akses pelayanan dasar, serta aksesibilitas wilayah. Keterbatasan tersebut berdampak pada rendahnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sekaligus membatasi kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi secara optimal dalam berbagai aktivitas sosial maupun politik. Dengan demikian, karakteristik desa tertinggal tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik wilayah, tetapi juga memengaruhi dinamika kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Rasyid & Prasetyo, 2023).

Karakteristik desa tertinggal berpotensi memengaruhi dinamika partisipasi politik masyarakat. Keterbatasan tingkat pendidikan dapat memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politiknya. Kondisi ekonomi yang masih bergantung pada sektor pertanian atau pekerjaan informal menyebabkan masyarakat lebih memprioritaskan aktivitas ekonomi dibandingkan keterlibatan dalam kegiatan pemerintahan desa. Selain itu, kondisi geografis yang relatif sulit dijangkau serta keterbatasan infrastruktur dapat menghambat akses masyarakat terhadap informasi maupun forum-forum partisipatif yang diselenggarakan pemerintah desa (Yovinus & Nikodimus, 2022). Oleh karena itu, partisipasi politik masyarakat pada desa tertinggal memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan desa yang telah berkembang, sehingga perlu dikaji secara lebih mendalam.

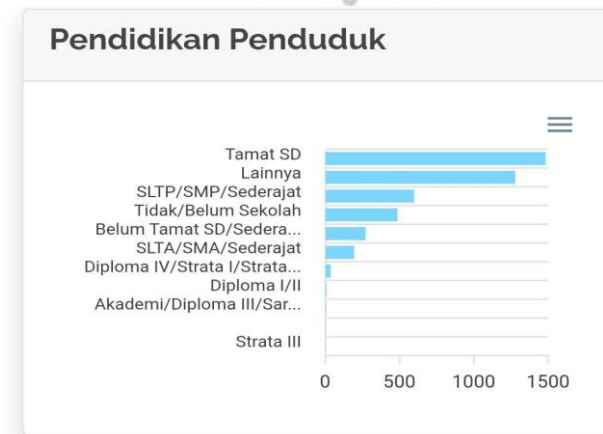
Salah satu desa yang menunjukkan karakteristik tersebut adalah Desa Sukaluyu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur. Berdasarkan data profil desa, sebagian besar masyarakat Desa Sukaluyu bekerja pada sektor pertanian, dengan tingkat pendidikan yang masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, kondisi infrastruktur jalan di beberapa wilayah desa belum sepenuhnya memadai sehingga masih memengaruhi mobilitas masyarakat dalam mengakses pusat pelayanan maupun kegiatan pemerintahan desa. Kondisi

geografis yang berada di wilayah perbukitan juga menyebabkan penyebaran informasi dan pelaksanaan pembangunan menghadapi tantangan tersendiri. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa Desa Sukaluyu masih menghadapi berbagai keterbatasan yang identik dengan karakteristik desa tertinggal.



Gambar 2. Kondisi Jalan Menuju Desa Sukaluyu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur (04 Januari 2026)

Sumber: <https://www.instagram.com/cikaduty>



Gambar 3. Tingkat Pendidikan Desa Sukaluyu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur Tahun 2024

Sumber: <https://sukaluyu-cikadu.co.id>



Gambar 4. Karakteristik Pekerjaan Desa Sukaluyu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur Tahun 2024

Sumber: <https://sukaluyu-cikadu.co.id>

Berbagai karakteristik tersebut menjadikan dinamika partisipasi politik masyarakat di Desa Sukaluyu menarik untuk dikaji. Di satu sisi, masyarakat telah memiliki ruang untuk berpartisipasi melalui Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), maupun keterlibatan dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Namun, di sisi lain, kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, mata pencaharian, serta aksesibilitas wilayah berpotensi memengaruhi bagaimana masyarakat memahami, merespons, dan terlibat dalam berbagai proses politik di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya melihat ada atau tidaknya partisipasi masyarakat, tetapi juga bagaimana partisipasi tersebut berlangsung dalam konteks karakteristik desa tertinggal.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa maupun partisipasi politik pada tingkat lokal. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada desa berkembang atau desa maju serta menitikberatkan pada tingkat keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan tanpa mengaitkannya dengan karakteristik desa tertinggal. Di sisi lain, penelitian yang mengkaji partisipasi politik masyarakat melalui perspektif budaya politik menurut Almond dan Verba sekaligus bentuk partisipasi

masyarakat menurut Cohen dan Uphoff dalam konteks desa tertinggal masih relatif terbatas. Akibatnya, belum banyak penelitian yang mampu memberikan gambaran secara komprehensif mengenai bagaimana orientasi politik masyarakat dan bentuk partisipasi masyarakat berlangsung dalam kondisi desa yang memiliki berbagai keterbatasan pembangunan.

Penelitian ini memiliki kebaruan pada objek, konteks, dan pendekatan analisis. Dari aspek objek, penelitian dilakukan di Desa Sukaluyu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur yang memiliki karakteristik desa tertinggal. Dari aspek konteks, penelitian tidak hanya menggambarkan partisipasi politik masyarakat, tetapi juga menganalisis partisipasi tersebut dalam konteks karakteristik desa tertinggal yang memengaruhi dinamika kehidupan masyarakat. Sementara itu, dari aspek pendekatan analisis, penelitian ini mengintegrasikan teori budaya politik Almond dan Verba dengan teori partisipasi Cohen dan Uphoff sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai orientasi politik masyarakat sekaligus bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Penelitian ini penting dilakukan karena partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu unsur utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif. Pemahaman mengenai bagaimana partisipasi politik masyarakat berlangsung pada desa dengan karakteristik tertinggal diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai berbagai dinamika yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu politik, khususnya mengenai partisipasi politik di tingkat lokal, tetapi juga menjadi masukan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis desa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa partisipasi politik masyarakat merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan demokrasi, khususnya pada tingkat desa. Namun, karakteristik desa tertinggal yang ditandai oleh keterbatasan sumber daya manusia, kondisi sosial ekonomi, aksesibilitas

wilayah, dan infrastruktur berpotensi membentuk dinamika partisipasi politik yang berbeda dibandingkan dengan desa yang lebih berkembang. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menggambarkan secara komprehensif bagaimana orientasi politik masyarakat di Desa Sukaluyu dan juga bagaimana bentuk partisipasi masyarakat di Desa Sukaluyu berlangsung dalam karakteristik desa tertinggal melalui analisis orientasi politik masyarakat berdasarkan teori Almond dan Verba serta bentuk partisipasi masyarakat berdasarkan teori Cohen dan Uphoff. Atas dasar tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus di Desa Sukaluyu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana orientasi politik masyarakat di Desa Sukaluyu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat di desa sukaluyu, kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis orientasi politik masyarakat di Desa Sukaluyu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur
2. Untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat di Desa Sukaluyu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Ilmu Politik, khususnya dalam bidang partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai partisipasi politik masyarakat pada desa melalui analisis budaya politik berdasarkan teori Gabriel Almond dan Sidney Verba serta

teori partisipasi masyarakat dari Cohen dan Uphoff. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji partisipasi politik masyarakat dalam konteks pemerintahan dan pembangunan desa.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Desa Sukaluyu dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat sesuai dengan karakteristik desa yang dimiliki. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi dalam mengembangkan penelitian mengenai partisipasi politik masyarakat, khususnya pada desa yang memiliki karakteristik desa tertinggal.

E. Kerangka Berpikir

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif. Namun, tingkat dan bentuk partisipasi politik masyarakat tidak selalu sama pada setiap desa karena dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, serta aksesibilitas yang berbeda. Kondisi tersebut juga ditemukan di Desa Sukaluyu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur yang menunjukkan karakteristik mengarah pada desa tertinggal, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, dominasi mata pencaharian pada sektor pertanian, serta keterbatasan aksesibilitas wilayah. Karakteristik tersebut menjadi konteks yang penting untuk memahami bagaimana partisipasi politik masyarakat berlangsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menganalisis partisipasi politik masyarakat menggunakan dua perspektif teori yang saling melengkapi. Teori budaya politik Gabriel Almond dan Sidney Verba digunakan untuk menganalisis orientasi politik masyarakat yang meliputi orientasi kognitif, orientasi afektif, dan

orientasi evaluatif. Ketiga orientasi tersebut digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat mengetahui, menyikapi, dan menilai kehidupan politik serta penyelenggaraan pemerintahan desa. Sementara itu, teori partisipasi masyarakat dari Cohen dan Uphoff digunakan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi.

Melalui kedua perspektif tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai partisipasi politik masyarakat pada desa dengan karakteristik desa tertinggal di Desa Sukaluyu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur. Dengan demikian, penggunaan kedua teori tersebut tidak dimaksudkan untuk menguji hubungan antarvariabel, melainkan sebagai kerangka analisis untuk memahami fenomena partisipasi politik masyarakat secara lebih mendalam sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif.





Gambar 5. Kerangka Berpikir